

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN****(Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan)****Syahnor Rifa'i¹, Reno Affrian², Akhmad Berkatillah³**

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: syahnorrifai99@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Balangan meliputi pengawasan yang belum efektif, kesulitan atau menurunnya kesadaran masyarakat dalam membayar, serta pencapaian target retribusi yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perencanaan, tujuan pengelolaan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sudah jelas, langkah-langkah perencanaan telah ditetapkan, dan keputusan mengacu pada peraturan daerah. Namun, pada pengorganisasian, kemampuan dan pemahaman petugas masih kurang, sehingga prosedur tidak dijalankan dengan baik. Dalam penggerakan, pelaksanaan sesuai perencanaan terganggu karena menurunnya kesadaran pembayaran, sehingga target belum tercapai. Pengawasan juga belum efektif dan efisien karena proses berjalan tidak sesuai rencana dan cenderung berulang. Faktor penghambat meliputi ketidakjelasan tarif retribusi, pemahaman petugas yang terbatas, aspek pengelolaan dan pelaksanaan yang kurang jelas, serta alur kerja yang tidak tertata. Sementara faktor pendukung mencakup peningkatan pendapatan asli daerah, terciptanya akuntabilitas penggunaan rumah dinas, dan pemeliharaan aset yang konsisten.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi, Kabupaten Balangan**ABSTRACT**

Problems in the management of levies for the use of regional assets in Balangan Regency include ineffective supervision, difficulties or declining public awareness in paying, and suboptimal achievement of levy targets. This study used a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observation, and documentation. The results indicate that in terms of planning, the objective of levy management to increase regional revenue is clear, planning steps have been established, and decisions refer to regional regulations. However, in terms of organization, the ability and understanding of officers are still lacking, resulting in procedures being poorly implemented. In terms of mobilization, implementation according to the plan is hampered by declining awareness of payment, resulting in targets not being achieved. Supervision is also ineffective and inefficient because processes do not run according to plan and tend to be repetitive. Inhibiting factors include unclear levy rates, limited officer understanding, unclear management and implementation aspects, and disorganized workflows. Supporting factors include increasing regional revenue, creating accountability for the use of official residences, and consistent asset maintenance.

Keywords: Management, Levy, Balangan Regency

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih baik dan dilaksanakan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu faktor penting dalam pembangunan adalah aspek keuangan, karena anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah yang berupa perhitungan keuangan dalam periode tertentu dan menjadi tolok ukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yang bertanggung jawab. Pengelolaan pembangunan daerah harus dilakukan secara tepat agar perekonomian daerah meningkat dan tujuan pembangunan dapat tercapai dengan akurat. Pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan daerah dapat diperoleh baik dari sumber dalam daerah maupun dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan antara lain pajak, retribusi, dan kekayaan daerah lainnya. Peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari kerja sama antara eksekutif dan legislatif, yaitu Bupati, DPRD, serta dinas-dinas terkait seperti Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pendekatan yang tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan identitas lokal.

Di Kabupaten Balangan, pengelolaan retribusi yang menjadi tugas Kantor Sekretariat Daerah mencakup pengaturan proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari pedagang atau pengguna fasilitas daerah untuk mendukung pembangunan. Kebijakan retribusi tidak ditetapkan sembarangan, melainkan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. PERBU dan PERDA diterapkan agar pemerintah mampu mengarahkan aparat retribusi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, meningkatkan pengawasan, menyosialisasikan retribusi pasar melalui berbagai media seperti poster, serta memperhatikan pembangunan fasilitas pasar agar masyarakat terdorong untuk membayar retribusi. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan rumah tangga daerah, terutama dalam pendapatan daerah, sarana dan prasarana pasar, kedisiplinan dan kejujuran aparatur, serta partisipasi masyarakat terhadap retribusi, sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat.

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan mengelola berbagai jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk gedung bangunan, lapangan, rumah dinas, tanah, reklame, peralatan mesin pertanian, alat berat, wisma, dan kekayaan daerah lainnya. Berdasarkan observasi awal, pengelolaan retribusi menghadapi sejumlah kendala. Pertama, pengawasan yang dilakukan kurang efektif, terutama pada Rumah Dinas Garuda Maharam, di mana pembayaran sering tidak memenuhi target bulanan karena pengguna rumah dinas sering bepergian, sehingga tagihan menunggak. Dari 42 rumah dinas yang terbagi dalam lima blok, tarif per bulan untuk Blok A, B, dan C adalah Rp 250.000, sedangkan Blok D dan E Rp 200.000, namun realisasi pembayaran rata-rata hanya mencapai 60%. Kedua, kesulitan dalam pembayaran dan menurunnya kesadaran membayar menjadi masalah, karena sebagian oknum atau pihak dekat pejabat cenderung menganggap retribusi kurang penting. Ketiga, target retribusi belum tercapai, terlihat dari penurunan perolehan selama tiga bulan terakhir; Februari sebesar 60%, Maret 55%, dan April hanya 52%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Balangan dengan studi kasus pada Rumah Dinas Garuda Maharam, guna mengetahui kendala, proses, dan strategi yang diterapkan dalam pengelolaan retribusi ini.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Paringin, Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71612.

Pendekatan penelitian merupakan suatu strategi atau perencanaan yang dirancang untuk menentukan bagaimana proses penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan

jenis penelitian eksplanatif (penjelasan), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tipe studi yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan cara untuk menginterpretasikan data yang ada, seperti halnya mengenai keadaan yang dialami.

Jenis data yang diambil menurut Sugiyono (2016:25) dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber data utama, yaitu :

1. Data Primer yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dilapangan, yang bersumber dari jumlah keseluruhan pegawai.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti.

Sumber Data menurut Sugiyono (2016:25) adalah data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari informan. Apabila riset menggunakan wawancara untuk mengumpulkan datanya, maka sumber data dikenal sebagai informan, yaitu individu yang memberikan respons dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi sehingga sumber data juga disebut informan. Informan merujuk pada individu yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi data. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai terhadap informan pangkal sampai infoeman kunci.

Desain operasional penelitian menurut Sugiyono (2016:2) adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan, bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
G. Terry (2018:315) fungsi pengelolaan	1. Perencanaan	a. Tujuan b. Penyusunan langkah-langkah c. Keputusan
	2. Pengorganisasian	a. Kemampuan b. Sumberdaya Manusia
	3. Penggerakan	a. Sesuai perencanaan b. Mencapai Tujuan
	4. Pengawasan	a. Efektif b. Efesien

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:217) sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu teknik penggalan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas pada responden dan informan untuk melengkapi data yang digali melalui teknik lainnya.

2. Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan).

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data didokumen atau arsip dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Teknik analisa data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasikan secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan).

Menurut (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14), terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Membangun presentasi, pada fase ini metode yang paling sederhana untuk maju adalah dengan membagi inovasi menjadi bagian-bagian atau elemen-elemen tertentu, menggunakan ini sebagai garis matriks. Sisi vertikal matriks mencakup periode waktu, mulai dari penggunaan awal hingga penggunaan selanjutnya. Jika terdapat perubahan pada elemen selama periode tersebut, kita dapat menambahkan penjelasan singkat mengenai perubahan itu (Miles, Huberman dan Saldana, 2016:14).
2. Memasukkan informasi. Pada fase ini, peneliti sedang mencari perubahan yang terjadi pada inovasi, elemen demi elemen. Perubahan tersebut dapat dicatat dalam catatan lapangan wawancara dengan pengguna inovasi yang telah diberi kode, yang secara khusus ditanya apakah mereka telah menciptakan sesuatu yang sudah diberi kode dalam buku inovasi.
3. Menganalisis informasi. Pada fase ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dengan merujuk kembali kepada elemen lain dari catatan lapangan, terutama informasi tambahan yang diberikan oleh orang-orang mengenai perubahan tersebut atau alasannya. Proses analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung sejak sebelum ke lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah meninggalkan lapangan.

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji keabsahan data sebagaimana disimpulkan oleh sugiyono (dalam Patimah 2017:45) salah satu nya uji kredibilitas ialah kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

Penelitian yang berjudul Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan):

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan menunjukkan bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian, melakukan observasi dan wawancara dengan sumber data yang lama serta yang baru. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kedekatan antara peneliti dan narasumber agar semua informasi dapat diungkap tanpa ada yang ditutupi.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih teliti dan terus-menerus. Dengan cara ini, data dan rangkaian kejadian dapat dicatat dengan tepat dan teratur. Dengan cara meningkatkan ketekunan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Bahan rujukan dalam konteks ini adalah keberadaan saksi yang dapat membuktikan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti. Informasi mengenai hubungan antar manusia atau deskripsi suatu situasi perlu dilengkapi dengan gambar-gambar. Peralatan untuk merekam informasi dalam penelitian kualitatif, seperti kamera dan alat perekam suara, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

4. *Member check*

Member check merupakan langkah untuk memverifikasi informasi yang didapat oleh peneliti dari sumber data. Tujuan dari member check adalah untuk menilai seberapa akurat data yang diperoleh dibandingkan dengan informasi yang disampaikan oleh sumber data.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan aset di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas kantor dapat tersedia secara tepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan retribusi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tergolong baik. Tujuan utama pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah secara produktif. Rumah Dinas Garuda Maharam memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah melalui penerapan retribusi yang transparan. Dari observasi peneliti, terlihat bahwa pengelolaan retribusi memastikan rumah dinas digunakan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga aset daerah tidak menganggur dan memberikan manfaat yang nyata bagi pemerintah daerah. Hasil dokumentasi, seperti buku pemakaian, laporan penggunaan, dan surat izin pemanfaatan aset, menunjukkan keteraturan yang memadai; setiap penggunaan aset tercatat secara lengkap, mencakup tanggal, pihak pemakai, dan besaran retribusi, sehingga tujuan transparansi dalam pengelolaan retribusi dapat dikatakan telah tercapai. Dengan demikian, secara keseluruhan, pengelolaan Rumah Dinas Garuda Maharam mendukung peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset yang efektif, efisien, dan transparan.

b. Penyusunan Langkah-Langkah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penyusunan langkah-langkah pengelolaan retribusi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tergolong baik. Penyusunan ini secara jelas menentukan tujuan pengelolaan retribusi, seperti peningkatan pendapatan daerah, pemanfaatan aset secara efisien, dan terciptanya akuntabilitas dalam penggunaan rumah dinas. Dari hasil observasi, terlihat bahwa mekanisme administrasi retribusi telah dibuat secara sistematis, mulai dari permohonan penggunaan, pembayaran retribusi, hingga pencatatan di sistem informasi aset daerah. Dokumen pendukung juga menunjukkan adanya SOP yang menguraikan tahapan pengelolaan retribusi secara runtut, mulai dari proses permohonan, verifikasi dokumen, penentuan besaran retribusi, hingga penyetoran ke kas daerah. Dengan demikian, langkah-langkah yang diterapkan telah sesuai dan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan retribusi secara transparan dan akuntabel.

c. Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan retribusi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tergolong baik. Keputusan yang diambil telah mengacu pada peraturan daerah yang berlaku, sehingga seluruh kebijakan terkait tarif, penggunaan, dan pemeliharaan aset dijalankan secara konsisten. Dari hasil observasi, terlihat bahwa setiap tahapan, mulai dari pengajuan penggunaan rumah dinas hingga pencatatan pembayaran retribusi, mengikuti prosedur yang

telah ditetapkan. Dokumentasi pendukung, seperti SK Bupati atau instansi terkait, menetapkan besaran tarif retribusi untuk pemakaian Rumah Dinas Garuda Maharam, yang membuktikan bahwa keputusan ini dilakukan secara resmi berdasarkan regulasi, bukan secara informal. Dengan demikian, pengelolaan retribusi berjalan sesuai ketentuan yang ada, mendukung transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian pengelolaan aset merupakan proses penataan struktur, pembagian tugas, serta penentuan wewenang dan tanggung jawab antarpegawai atau unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan.

a. Kemampuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas dalam pengelolaan retribusi Rumah Dinas Garuda Maharam tergolong kurang baik. Banyak prosedur administratif yang tidak dijalankan secara konsisten, sehingga realisasi pembayaran retribusi setiap bulan sering tidak mencapai target. Hal ini sebagian disebabkan oleh pengguna rumah dinas yang sering bepergian, sehingga tagihan tertunggak dan tidak terealisasi sesuai target. Dari observasi, terlihat bahwa pengelola belum menunjukkan kompetensi yang memadai dalam koordinasi; komunikasi antara pengelola aset, bagian keuangan, dan pihak pengguna aset sering tidak sinkron. Akibatnya, laporan retribusi menjadi terlambat dan sering terjadi ketidaksesuaian antara data lapangan dan administrasi. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa realisasi pembayaran rata-rata hanya mencapai 60% per bulan, memperkuat bahwa kemampuan petugas dalam pengelolaan retribusi masih perlu ditingkatkan.

b. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan masih kurang baik. Banyak petugas yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku, sehingga proses pengelolaan sering tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dari observasi, terlihat bahwa koordinasi antarpegawai masih rendah, banyak informasi tidak tersampaikan dengan baik, sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, keterlambatan laporan, dan ketidaksesuaian antara data lapangan dan administrasi. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa hampir tidak ada catatan pelatihan yang diberikan secara rutin kepada petugas, sehingga kemampuan mereka dalam pengelolaan retribusi jarang ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan koordinasi sumber daya manusia agar proses pengelolaan retribusi dapat berjalan lebih efektif.

3. Penggerakan

Penggerakan (actuating) merupakan proses untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan memotivasi seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset agar melaksanakan tugas sesuai rencana dan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, penggerakan mencakup upaya pimpinan, khususnya Sekretaris Daerah dan Bagian Umum, dalam mendorong pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar berjalan secara efektif, tertib secara administrasi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Sesuai Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penggerakan sesuai perencanaan tergolong kurang baik. Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi Rumah Dinas Garuda Maharam menurun, terlihat dari penurunan perolehan retribusi selama tiga bulan terakhir. Salah satu penyebabnya adalah adanya oknum atau pihak yang dekat dengan pejabat sehingga pembayaran retribusi dianggap kurang penting. Observasi menunjukkan bahwa pengelola tidak melakukan kajian mendalam sebelum menyusun rencana pengelolaan, sehingga perencanaan yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan nyata maupun potensi yang dimiliki Rumah Dinas. Dokumentasi juga

menunjukkan bahwa realisasi pembayaran rata-rata hanya mencapai 60% per bulan, menegaskan bahwa penggerakan yang dilakukan belum optimal dan masih perlu perbaikan agar target pendapatan daerah dapat tercapai.

b. Mencapai Tujuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan pengelolaan retribusi Rumah Dinas Garuda Maharam tergolong belum baik. Banyak target yang ditetapkan tidak diikuti dengan langkah-langkah pelaksanaan yang jelas, sehingga hasil yang diperoleh jauh dari harapan pemerintah daerah maupun masyarakat. Observasi menunjukkan bahwa proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan retribusi belum berjalan secara konsisten meskipun tujuan peningkatan pendapatan daerah telah ditetapkan, sehingga kontribusi yang dihasilkan masih rendah. Dokumentasi juga mengungkapkan adanya penggunaan rumah dinas yang tidak sesuai prosedur dan kurang terdokumentasi dengan baik, menandakan bahwa tujuan untuk menciptakan pengelolaan aset yang tertib dan terkontrol belum sepenuhnya tercapai.

4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan aset merupakan proses untuk memantau, menilai, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Balangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga tertib administrasi, keamanan fisik aset, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau kerugian daerah.

a. Efektif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan pengelolaan retribusi Rumah Dinas Garuda Maharam tergolong kurang baik. Proses pelaksanaan pengelolaan sering tidak berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, dan banyak tahapan dilakukan tanpa perencanaan yang matang sehingga hasilnya jauh dari target yang diharapkan pemerintah daerah. Observasi menunjukkan bahwa penggunaan aset tidak diatur secara ketat; rumah dinas sering dimanfaatkan tanpa administrasi yang jelas, sehingga perhitungan retribusi tidak akurat dan pengawasan tidak optimal.

b. Efisien

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pengawasan pengelolaan retribusi Rumah Dinas Garuda Maharam tergolong kurang baik. Banyak proses yang dilakukan berulang-ulang dan tidak mengikuti alur kerja yang jelas, sehingga waktu dan tenaga pegawai banyak terbuang tanpa memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan. Observasi juga menunjukkan bahwa koordinasi antarbagian masih sangat buruk; kurangnya komunikasi menyebabkan banyak proses tertunda, padahal beberapa langkah dapat diselesaikan lebih cepat jika dijalankan secara terkoordinasi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan (Studi Kasus Rumah Dinas Garuda Maharam Kabupaten Balangan).

1. Faktor Penghambat

a. Ketidakjelasan Tarif Retribusi yang Diterima

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan terkait tarif retribusi yang diterima oleh pengguna Rumah Dinas Garuda Maharam. Besaran tarif masih belum disampaikan secara resmi kepada masyarakat, karena tidak ada dokumen atau pemberitahuan tertulis yang menjelaskan tarif yang berlaku. Hal ini menyebabkan kebingungan dan keraguan bagi masyarakat mengenai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Observasi juga menunjukkan adanya perbedaan informasi antara petugas dan dokumen yang ada; dalam beberapa kasus, tarif yang dibebankan tidak sesuai dengan aturan tertulis, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepatuhan pembayaran retribusi.

b. Petugas yang Belum Memiliki Pemahaman

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman petugas terkait pengelolaan retribusi masih kurang memadai. Banyak petugas yang belum menguasai prosedur pengelolaan retribusi secara menyeluruh, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan tugas sering terjadi. Observasi menunjukkan bahwa petugas kurang memahami aturan dasar pengelolaan aset daerah, termasuk mekanisme penetapan tarif, pencatatan penggunaan, serta dasar hukum dan perhitungan retribusi. Kondisi ini menyebabkan kebingungan bagi para pengguna dan menghambat kelancaran proses pengelolaan retribusi.

c. Aspek yang Tidak Dirumuskan Secara Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa banyak aspek dalam pengelolaan retribusi belum dirumuskan secara jelas. Tujuan dan indikator kinerja sering kali tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen perencanaan, sehingga menyulitkan penilaian terhadap keberhasilan pengelolaan. Kondisi ini membuat pelaksanaan pengelolaan retribusi sering membingungkan baik bagi petugas maupun bagi para pengguna, sehingga efektivitas dan keteraturan proses menjadi terganggu.

d. Pelaksanaan yang Kurang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi masih kurang jelas. Hal ini disebabkan tidak adanya arahan teknis yang rinci mengenai prosedur yang harus diikuti oleh petugas. Observasi menunjukkan bahwa kegiatan operasional sering tidak sesuai dengan rencana karena petugas tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah pelaksanaan, sehingga pengelolaan retribusi tidak berjalan secara terstruktur dan konsisten.

e. Pelaksanaan Tidak Berjalan Sesuai Mekanisme

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi sering tidak berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Banyak tahapan penting dalam SOP dilewati, sehingga proses pemungutan dan pencatatan retribusi menjadi tidak teratur. Observasi menunjukkan bahwa akibatnya, hasil akhir pengelolaan retribusi tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, menurunkan efektivitas dan keteraturan pelaksanaan.

f. Pengelolaan Retribusi Tidak Mengikuti Alur Kerja yang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi belum mengikuti alur kerja yang jelas. Setiap petugas menjalankan tugas dengan cara masing-masing tanpa pedoman yang sama, sehingga proses pencatatan, penagihan, dan pelaporan retribusi dilakukan secara tidak seragam. Observasi menunjukkan bahwa ketidakadaan alur kerja yang baku mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan retribusi menjadi tidak konsisten dan sulit dikontrol secara efektif.

2. Faktor Pendukung

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi di Rumah Dinas Garuda Maharam telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pencatatan dan penarikan retribusi dilakukan lebih teratur dibandingkan sebelumnya, sehingga pendapatan daerah dari pemanfaatan aset tersebut meningkat secara bertahap. Observasi juga menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam mekanisme pengelolaan retribusi, yang berperan dalam mendorong peningkatan PAD secara konsisten.

b. Terciptanya Akuntabilitas Dalam Penggunaan Rumah Dinas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam penggunaan Rumah Dinas Garuda Maharam telah tercapai. Setiap pemanfaatan rumah dinas dicatat dan dilaporkan secara transparan oleh petugas, sehingga pengelolaan mengikuti aturan

yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Observasi menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan dan pelaporan yang sistematis ini mendukung terciptanya pengelolaan aset yang akuntabel dan jelas bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

c. Pemeliharaan Aset Dijalankan Dengan Konsisten

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan aset, khususnya Rumah Dinas Garuda Maharam, dijalankan secara konsisten. Pemeliharaan dilakukan dengan mengikuti jadwal pemeriksaan rutin oleh petugas terkait, mencakup pengecekan fasilitas dan kebersihan bangunan. Observasi menunjukkan bahwa perawatan aset daerah ini berjalan dengan baik, sehingga kondisi rumah dinas tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

SIMPULAN

Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan, khususnya pada Rumah Dinas Garuda Maharam, masih tergolong kurang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator pada sub variabel pengelolaan. Pertama, pada sub variabel perencanaan, indikator tujuan tergolong baik, di mana tujuan utama pengelolaan retribusi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah secara produktif. Indikator penyusunan langkah-langkah juga baik karena langkah-langkah yang dibuat mampu menentukan tujuan pengelolaan retribusi, seperti peningkatan pendapatan daerah. Indikator keputusan dinilai baik karena seluruh pengelolaan retribusi telah mengacu pada peraturan daerah yang berlaku. Kedua, pada sub variabel pengorganisasian, kemampuan petugas tergolong kurang baik karena banyak prosedur administratif tidak dijalankan secara konsisten, sehingga data terkait penggunaan Rumah Dinas Garuda Maharam sering tidak akurat. Sumber daya manusia juga kurang baik karena banyak petugas yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi dan prosedur yang berlaku. Ketiga, pada sub variabel penggerakan, pelaksanaan sesuai perencanaan kurang baik karena kesadaran pembayaran menurun. Indikator pencapaian tujuan juga belum baik karena banyak target yang ditetapkan tidak diikuti oleh langkah-langkah pelaksanaan yang jelas. Keempat, pada sub variabel pengawasan, indikator efektivitas kurang baik karena proses pelaksanaan tidak berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Indikator efisiensi juga kurang baik karena banyak proses dilakukan berulang-ulang dan tidak mengikuti alur kerja yang jelas.

Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan retribusi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat meliputi ketidakjelasan tarif retribusi yang diterima, petugas yang belum memahami prosedur dengan baik, aspek pengelolaan yang tidak dirumuskan secara jelas, pelaksanaan yang kurang jelas, pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai mekanisme, serta pengelolaan retribusi yang tidak mengikuti alur kerja yang baku. Sementara itu, faktor pendukung mencakup kemampuan pengelolaan retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terciptanya akuntabilitas dalam penggunaan rumah dinas, serta pemeliharaan aset yang dijalankan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

George R. Terry, L. W. 2018. Dasar-Dasar Manajemen Cetakan Kesebelas. PT. Bumi Aksara, Jakarta



Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2017. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, Huberman dan Saldana, 2017. *Qualitative Data Analysis A Methode Sourcebook*. Publications.

Zahroh. 2015. *Membangun Kualitas Pembelajaran melalui Dimensi*. Bandung: Yrama Widya

Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta Bandung.

Tim Penyusun, 2025. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*.